

KEDUDUKAN SURAT PERSETUJUAN CALON AHLI WARIS PENGHIBAH SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN HIBAH TANAH DI KOTA YOGYAKARTA

Oleh :

Belia Widya Putri Lestari¹ dan Ninik Darmini²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan surat persetujuan dari calon ahli waris penghibah sebagai syarat pemberian hibah tanah di Kota Yogyakarta dan upaya perlindungan hukum terhadap pemberi hibah yang tidak mendapatkan surat persetujuan dari calon ahli warisnya untuk pelaksanaan hibah tanah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Jenis penelitian ini menekankan pada pembahasan norma-norma hukum yang ada dikomparasikan dengan praktek penerapannya di lapangan (data yang didapat di lapangan) sebagai data empiris mengenai permasalahan yang sedang dibahas. Cara memperoleh data, dilakukan penelitian kepustakaan agar mengetahui dasar-dasar hukum yang berlaku, lalu membandingkan dengan penerapannya yang didapat melalui wawancara terhadap responden. Seluruh data kemudian diuraikan dan dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kedudukan surat persetujuan dari calon ahli waris penghibah sebagai syarat pemberian hibah tanah di Kota Yogyakarta merupakan syarat mutlak dalam melakukan pendaftaran hibah tanah. Pemberi hibah yang tidak mendapatkan surat persetujuan dari calon ahli warisnya maka berimplikasi pada tidak adanya perlindungan hukum yang diterima oleh pemberi hibah. Pemberlakuan tentang surat persetujuan ini tidak dapat diberlakukan secara umum. Karena terdapat perbedaan di dalam sistem hukum waris yang ada. Ada perbedaan aturan dalam tiap hukum waris mengenai ahli waris yang berhak dan bagian dari harta kekayaan yang bisa dihibahkan oleh pewaris.

Kata kunci: hibah, surat persetujuan, calon ahli waris.

¹ Mahasiswa Program S-2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

The Position of the Approval Letter from Prospective Heirs as a Requirement on Land Granting in Yogyakarta City

By :

Belia Widya Putri Lestari¹ and Ninik Darmini²

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the importance of the letter of approval from the heirs as a requirement of land granting in Yogyakarta, and the law protection for the grantors who did not obtain an approval letter from the prospective heirs in the execution of aforementioned land grant.

The research is a study of the juridical empirical law. This type of research puts emphasis on the discussion of the existing legal norms in comparison with the practical application in the field (the data obtained in the field) as empirical data on the consideration issues. As a way to obtain the data, a research literature had been done in order to know the basics of applicable laws and compared these with the data obtained through interviews with respondents. All data are then described and analyzed qualitatively.

Based on this research, it is known that the standing of approval letter of the prospective heir grant as a condition of land granting in the Yogyakarta City is an absolute requirement to register a grant of land. Grantors who did not obtain an approval letter from the prospective heirs then face an absence of legal protection as its implication. The enforcement of this approval letter could not be imposed in general as there are differences in the existing legal systems of inheritance. There are differences in the rules of each inheritance law regarding the rightful heirs and the portions of property that could be granted by the testator.

Keywords: *grant, letter of approval, prospective heirs.*

¹ Student of Master of Notary Program Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

² Lecturer of Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta.